

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kejelasan Sasaran Anggaran secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa, semakin jelas sasaran anggaran yang diberikan maka akan mempermudah untuk mempertanggung jawabkan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.
2. Pengendalian Akuntansi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan. Dapat disimpulkan bahwa, semakin baik Pengendalian Akuntansi, dapat mengurangi tingkat kekeliruan (tidak sengaja) atau ketidakberesan (sengaja) sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.
3. Sistem Pelaporan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan. Sehingga disimpulkan bahwa semakin tinggi sistem pelaporan akan semakin meningkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.
4. Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan secara simultan atau bersama-sama berpengaruh positif dan

signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan. Dengan demikian dapat diartikan bahwa semakin baik penerapan kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan yang ada maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan akan meningkat.

## **5.2 Saran**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Dari hasil penelitian ini saran yang dapat disampaikan penulis adalah sebagai berikut :

1. Penelitian selanjutnya dapat melengkapi metode survei dengan cara wawancara (lisan) dan tertulis (kuesioner) untuk meningkatkan sikap keseriusan responden dalam merespon semua pernyataan atau pertanyaan yang ada.
2. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel lain yang mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan agar selalu mengevaluasi yang berkaitan dengan laporan kinerja dari tahun ke tahun, karena semakin tinggi efektivitas anggaran maka semakin efektif dan akuntabel.